

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chaerul Amir, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi*, Jakarta, Deleader.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- A. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH Sitorius, *Diterjemahkan oleh J.E Sahetapy, 1995, Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

DPR RI, 2015, *Mekanisme Penyusunan Rancangan Undang-Undang Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

B. Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung

Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

-----, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta

Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban tanpa kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.

J.E Sahetapy, 2007, *Yang Memberi Teladan Dan Menjaga Nurani Hukum Dan Politik*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka

Jimly Asshiddiqie, 1995, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung.

Jeremy Pope, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

John Gillisen dan Frist Gorle, 2005, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung

- Karen Lebacqz, 2015, *Teori-Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Kompas
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Montesquieu, 2007, *The Spirit Of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Penerjemah: M. Khoiril Anam, Nusamedia, Bandung
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Rene David & John E.C Brierley, 1985, *Major Legal Systems In The World Today, Third Edition*, Stevens & Sons, London
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Sakti, Bandung
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-
- _____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga*, UI Perss, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingeate Grand and Larissa Gray, 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington D.C, The World Bank & UNODC.
- T.J Gunawan, 2015, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta, Genta Press
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Yenti Ganarsih, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia* ,Jakarta, Rajawali Pers.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Paper

Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Hermawan, 2014, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Lembaga Pelaksana: *Indonesia Corruption Watch*

Rimawan Pradipto, *Estimasi Biaya Sosial Korupsi*, Makalah disampaikan pada FGD Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Perhitungan dan Penerapannya di Indonesia, KPK

D. Kamus

Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing CO

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

E. Jurnal

Adnan Topan Husodo, 2010, "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" dalam *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Azra, Azyumardi, 2002, *Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2, no. 1.

Damanhuri Fattah, 2013, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, *Jurnal TAPIs* Vol. 19 No. 2 Juli-Desember 2013

Eddy O.S Hiariej, 2007, *Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas*, *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 16 Tahun IV, April-Juni 2007

Evans Emanuel Sinulingga, 2017, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata*, *Jurnal Lex Administratum* Vol. 5, no. 4,

Frans Rudy Putra Zebua, Iman Jauhari, and Taufik Siregar, 2008, *Tanggung jawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata (Case Study in Medan District Court)*, *Jurnal Mercatoria* Vol. 1, no. 2.

Jamin Ginting, 2011, *Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, no. 3.

J.E Sahetapy, 2003, *Asas Retroaktif: Suatu Kajian Ulang*, *KHN Newsletter*, Edisi Mei 2003

- Kausar Dwi Kususma, 2019, *Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Mutual Legal Assistance*, Universitas Brawijaya,
- Latifah, Marfuatul, 2015, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum Vol. 6, no. 1,
- Melani, 2005, *Problematika Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya dengan Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Vol. 6, no. 2.
- Nani Mulyati & Aria Zurnetti, 2022, *Asset Recovery as a Fundamental Principal Law Enforcement of Corruption by Corporations*, Andalas International Journal of Socio-Humanities, 4(1), 51-60.
- Nurmalawaty, 2006, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality Vol. 11, no. 1.
- Refki Saputra, 2017, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 3(1).
- Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

F. Sumber Lain

- Aradila Caesar Ifmaini Idris, *Menghukum Ringan Koruptor* (<https://antikorupsi.org/id/article/menghukum-ringan-koruptor>).
- Koran SI, *Pemiskinan Harus Jadi UU* (<https://economy.okezone.com/read/2012/03/06/436/587799/pemiskinan-harus-jadi-uu>)
- Machfoed Gembong, *Pemiskinan Jadi Pilihan Hukuman Bagi Koruptor* (<https://antikorupsijateng.wordpress.com/2012/03/03/pemiskinan-jadi-pilihan-hukuman-bagi-koruptor/>)
- Mochamad Zhacky, *Idrus Mahram Bebas Usai Jalani Vonis 2 Tahun Bui* (<https://news.detik.com/berita/d-5169868/idrus-marham-bebas-usai-jalani-vonis-2-tahun-bui>).
- Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Lembaga Kajian & Advokasi

Indenpendensi Peradilan, http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidanatambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalamperkara-korupsi/#_ftn1.

Riset Publik, 2019, *Tantangan Penerapan Perampasan asset Tanpa Tuntutan pidana non Conviction based asset forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Dapat diakses di: <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>.

Yustinus Paat, *CSIS: Miskinkan Koruptor Demi Efek Jera* (<https://www.beritasatu.com/news/349282/csis-miskinkan-koruptor-demi-efek-jera>)

www.KPK.go.id

www.ti.or.id

